

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, "Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", PT Gramedia, Jakarta, hlm. 314.
- Leden Marpaung, 2001, "Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan", Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 3.
- Barda Nawawi Arif, 1992, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Alumni, Bandung, hlm. 2.
- Sudarto, 1990, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 40.
- Bambang Poernomo, 1981, "Asas-asas Hukum Pidana", Ghalia Indonesia, hlm. 92.
- Moeljatno, 2002, "Asas-asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1984, "Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia", PT Sinar Baru, Bandung, hal. 16.
- Hermien Hardiati Koewadji, 1984, "Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32.
- Selo Soemardjan, 1998, "Membasmi Korupsi", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 5.
- Barda Nawawi Arief, 2005, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36.
- Kessa, Wahyudin, 2015, "Perencanaan Pembangunan Desa", Jakarta.
- Sugiyono, 2013, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung, Alfabeta hlm. 59.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Pengantar Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 50.
- Bambang Sunggono, 2011, "Metodologi Penelitian Hukum", PT karya Unipress, Jakarta, hlm. 31.
- H. Noeng Muhadjir, 1996, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Rake Sarasin, Jakarta, hlm. 3.
- Muladi, 2000, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ganjar Laksamana, 2015, "Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi".
- R. Wiyono, 2005, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 26.
- Mardjono Reksodipuro, 1994, "Kemajuan Pembangunan Ekonomi, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum", Jakarta, hlm. 91.
- Bambang Poernomo, 1993, "Penegakan Hukum Pidana", Liberty, Yogyakarta, hlm. 166.

**Jurnal:**

Hayat Mar'atul Makhmudah, "*Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Yustia Vol.5 No. 2 Mei-Agustus 2016

Makhmudah, H.M.(2016), "*Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa*", Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Jurnal Uns, 5(2), hlm. 361-375.

Fathur Rahman, Ahmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "*Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa*"(Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur), Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang 2018. Hlm 32.

Andi Febriansyah Al Sabah AZ, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Al Daulah Vol 6 No 1, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2017, Makassar, hlm. 206.

Japansen Sinaga, "*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non-Penal*", Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017, Medan, hlm. 39

